

Membangun Kemandirian Ekonomi Lokal Masyarakat Desa Ngale Melalui Pemberdayaan Usaha Bersama Komunitas

Istiana Wijayanti Mala¹⁾, Misnan²⁾, Endang Setianingsih S³⁾

^{1,2)} Program Studi Manajemen Universitas Soerjo, Ngawi

³⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Soerjo, Ngawi

¹⁾ istianawijayantimala@gmail.com, ²⁾ misnan536@gmail.com

³⁾ setianingsihendang54@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk pemberdayaan penanggulangan kemiskinan yaitu berupa usaha masyarakat berbasis masyarakat yang dilakukan dengan mendirikan Usaha Bersama Komunitas seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngale. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana implementasi pengembangan kemandirian ekonomi lokal masyarakat desa melalui pemberdayaan Usaha Bersama Komunitas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis interaktif berdasarkan indikator pemberdayaan yang meliputi: memungkinkan, memperkuat, melindungi, dan mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Bersama Komunitas di Desa Ngale sudah berlangsung cukup baik, namun belum optimal. Pemungkinan cukup efektif dilakukan karena proses pemberdayaan dilakukan dari bawah ke atas. Penguatan sudah cukup berjalan, tetapi masih hanya terbatas pada produksi saja. Perlindungan sudah berjalan namun kurang optimal karena hanya dalam bentuk legitimasi kelembagaan dan bantuan modal. Hanya dukungan yang berjalan secara optimal karena ada dukungan dan partisipasi langsung pemerintah. Namun demikian, Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale telah berhasil membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa jika melihat dari sisi terpenuhinya kebutuhan hidup, perubahan hidup rumah tangga, dan perubahan psikologis anggota keluarga.

Kata Kunci: Kemandirian, Ekonomi, Pemberdayaan

Abstract

One form of poverty reduction empowerment is in the form of community-based community businesses that are carried out by establishing Community Joint Ventures such as those carried out by the Ngale Village Government. This research aims to comprehensively analyze how the implementation of the development of local economic independence of village communities through the empowerment of Community Joint Ventures. This research was conducted using a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was carried out through interactive analysis techniques based on empowerment indicators which include: enabling,

strengthening, protecting, and supporting. The results show that community empowerment through Community Joint Ventures in Ngale Village has been going on quite well, but not optimally. Enabling is quite effective because the empowerment process is done from the bottom up. Strengthening is already underway, but it is still limited to production. Protection is already in place but is less than optimal because it is only in the form of institutional legitimization and capital assistance. Only support that runs optimally because there is direct government support and participation. However, the Ngale Village Community Joint Venture has succeeded in building the economic independence of the village community when looking at the fulfillment of living needs, changes in household life, and psychological changes in family members.

Keywords: Independence, Economic, Empowerment

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan berdampak negatif pada kemajuan Nasional (Ma'wa & Cahyadi, 2023). Definisi umum kemiskinan ialah posisi di mana kemampuan *income* orang atau kelompok orang tidak mencukupi untuk menjangkau kebutuhan dasar mereka (Adawiyah, 2020). Kemiskinan dapat terjadi salah satunya karena pengangguran (Hanifah & Hanifa, 2021). Penyakit ekonomi yang berdampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi adalah pengangguran (Rianda, 2020). Tentu saja, masalah kemiskinan ini cukup rumit dan membutuhkan penyesuaian yang terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan.

Berbicara mengenai tingkat kemiskinan dan pengangguran Nasional, Badan Pusat Statistik Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022) pernah merilis data bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka tembus pada angka 8,96 juta (7,87%) dari jumlah keseluruhan angkatan kerja yang mencapai 113,83 juta. Lebih parahnya lagi tingkat kemiskinan dan pengangguran tersebut sebagian besar berada di wilayah pedesaan.

Pemerintah telah mengusulkan sejumlah program untuk mengurangi

tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk penyediaan lapangan pekerjaan dan menawarkan program pelatihan kejuruan untuk masyarakat (Sinurat, 2023). Namun, faktanya program tersebut belum terlalu berpengaruh secara signifikan untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran karena lapangan pekerjaan yang tersedia masih sangat terbatas dan tidak seimbang dengan tingginya angka angkatan kerja yang ada (Adriyanto et al., 2020). Kebijakan pengentasan kemiskinan sebenarnya tidak jauh dari pembangunan sumber daya manusia (masyarakat) itu sendiri, yang mengandung arti sebagai usaha sadar dan terarah yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka (Ferizaldi, 2022).

Pemberdayaan merupakan bagian dari rencana pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan adalah proses belajar mengajar yang dilakukan untuk individu maupun kelompok secara terencana, metodis, dan berlangsung lama dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam melakukan perubahan sosial (Setiadi & Pradana, 2022). Dalam hal pemberdayaan desa, program yang

memposisikan dan mengikutsertakan masyarakat desa sebagai pangkal pembangunan, yang secara aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, tentu saja menjadi arah pembangunan yang paling tepat dan efektif bagi masyarakat desa untuk mencapai tujuan (Muchtar, 2016). Selain itu, yang tidak kalah pentingnya juga ialah menyesuaikan antara arah pemberdayaan masyarakat desa dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu (Ibrahim et al., 2023). Hal ini untuk memastikan bahwa sasaran pembangunan telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan tetap berada di jalur yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program pemberdayaan bagi masyarakat desa dapat dilakukan secara berkelompok atau komunitas (Hilman & Nimasari, 2018). Kolaborasi yang kuat dan terstruktur antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa diperlukan dalam suksesi pemberdayaan berbasis komunitas (Suman et al., 2019). Disini, fungsi pemerintah meliputi perumusan kebijakan dan pengambilan kebijakan, implementasi kebijakan, pengawasan, penilaian, dan mediasi. Kemudian, tanggung jawab sektor swasta adalah membantu dalam hal ide, pelaksanaan, pengawasan, dan juga penilaian. Sedangkan tanggung jawab masyarakat adalah mengambil bagian dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (Raharjo, 2022)

Salah satu bentuk upaya pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan yang bersifat usaha kemasyarakatan berbasis komunitas untuk mendorong pengembangan potensi pada dunia usaha ialah pembentukan program Usaha Bersama Komunitas seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa

Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Menurut Yan Teguh Wibowo, S.Sos seorang Kepala Desa Ngale, program ini merupakan bentuk pelayanan dari pemerintah desa kepada masyarakat melalui fasilitasi program keterampilan yang tepat untuk membantu aktifitas ekonomi masyarakat miskin. Program ini juga merupakan upaya pemerintah desa dalam membangun ekonomi masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat, agar dapat mentas dari kemiskinan.

Mata pencaharian masyarakat Desa Ngale masih didominasi oleh sektor pertanian, dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani. Rata-rata tingkat pendidikan angkatan kerja Desa Ngale masih lulusan SMP dan SMA sederajat, sehingga mereka belum cukup dibekali dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Oleh karena itu dengan menciptakan suatu inisiatif program berupa Usaha Bersama Komunitas, merupakan langkah nyata yang diambil oleh Pemerintah Desa Ngale untuk memberikan lapangan pekerjaan baru kepada keluarga miskin agar dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale dipandang sangat membantu masyarakat desa untuk mencapai potensi penuh mereka dalam hal sikap, perilaku, dan karya sehingga mereka dapat diwujudkan sebagai manusia yang seutuhnya yang mampu berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka melalui usaha ekonomi yang inovatif. Menurut Yan Teguh Wibowo, S.Sos, harapan di balik Usaha Bersama Komunitas ini adalah agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, namun juga menjadi pelaku pasar yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing secara ekonomi. Diharapkan masyarakat

desa akan menjadi lebih mandiri melalui proses pemberdayaan dengan memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kewirausahaan.

Saat ini, isu pembangunan ekonomi lokal berbasis pada masyarakat desa menjadi semakin penting dalam pengembangan ekonomi nasional (Azizah & Muhfiatun, 2018). Jika melihat kembali data kemiskinan dan pengangguran dari (Badan Pusat Statistik, 2022), menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa dan sumber kehidupannya mayoritas hanya mengandalkan pada sektor pertanian saja. Tentunya, kondisi ini menimbulkan banyak kesenjangan dalam kemajuan sosial dan ekonomi di samping tantangan dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal (Gai et al., 2020). Oleh karena itu, saat ini sangat penting untuk mempraktikkan proyek pembangunan ekonomi di desa yang dapat mendukung terciptanya kemandirian ekonomi lokal melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Setiap desa memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan, dimana pemerintah desa memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan tersebut melalui pemberdayaan sebagai wujud tugas tambahan dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah. Namun disisi lain, realitanya aparatur pemerintah desa sendiri belum siap untuk melaksanakan praktik proyek pembangunan ekonomi karena aparatur desa tidak memiliki kapasitas yang kuat. Hal ini tentunya akan menjadi penghambat tersendiri dalam proses pemberdayaan potensi di desa untuk menuju kemandirian ekonomi lokal.

Meskipun sejumlah penelitian tentang pemberdayaan masyarakat pernah dilakukan, namun analisis yang lebih menyeluruh (komprehensif) terhadap

pembangunan kemandirian ekonomi lokal melalui pemberdayaan berbasis masyarakat, tentu masih diperlukan. Maka, tujuan studi penelitian ini untuk memberikan investigasi yang lebih menyeluruh mengenai metode yang digunakan dalam pembangunan kemandirian ekonomi lokal di desa melalui pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi pengembangan ekonomi lokal di Indonesia, karena temuan-temuannya nanti akan dapat dijadikan referensi bagi para pembuat kebijakan yang bertujuan ingin mengembangkan ekonomi lokal masyarakat desa berbasis komunitas. Penelitian ini menjadi sangat penting, dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lokal di desa dapat menjadi sebuah jawaban atas ketidakmerataan pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia yang saat ini terjadi.

B. LANDASAN TEORITIS

Djohani menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah upaya membangun keberdayaan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri dan menjadi lebih mandiri (Haris, 2014). Istilah pemberdayaan masyarakat juga dapat merujuk pada upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kolektif dalam mengatasi segala masalah yang berkaitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup (Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2019). Dapat pula dikatakan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memperkuat kapasitas seseorang agar mampu mandiri dengan membekali dengan pengetahuan dan keterampilan

yang diperlukan untuk mengatasi berbagai hambatan, meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kualitas hidup, dan mengangkat derajat mereka di tengah-tengah masyarakat.

Akhir dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya jumlah orang yang berdaya, memperluas keterampilan, dan terpenuhinya segala kebutuhan baik pada tataran sosial, ekonomi, dan fisik (Suharto, 2014). Agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai, pendekatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam proses pemberdayaan menurut (Suharto, 2014) antara lain adalah: 1) *enabling*, pemerintah mampu menumbuhkan lingkungan atau iklim yang sesuai dengan potensi masyarakat; 2) *empowering*, pemerintah membantu masyarakat untuk menumbuhkan semua keterampilan dan kepercayaan diri dalam mendukung terciptanya kemandirian; 3) *protecting*, pemerintah mampu melindungi masyarakat lemah dari penindasan pihak yang kuat, menghentikan persaingan yang tidak sehat dan tidak seimbang dan menghentikan eksploitasi keuntungan dari pihak yang kuat; dan 4) *supporting*, pemerintah mampu mendukung dan mencegah masyarakat lemah menjadi semakin tersisih dan lemah.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka pembedayaan masyarakat yang dimaksud ialah pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ialah langkah yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kondisi kehidupan melalui pengembangan usaha agar berdaya secara ekonomi (Maspaitella & Rahakbauwi, 2014). Dalam pemberdayaan ekonomi, masyarakat didorong untuk berusaha lebih keras, menjalankan ide-ide inovatif mereka, dan melatih kemandirian dalam berbisnis (Hidayat, 2020). Pada

penelitian ini, peneliti berkonsentrasi pada pemberdayaan ekonomi lokal masyarakat melalui Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale agar mereka menjadi mandiri secara ekonomi.

Menurut teori Munandar, pemberdayaan ekonomi merupakan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun lembaga lain dengan tujuan untuk meningkatkan modal dan keterampilan hidup agar mampu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya dengan cara memulai dan mengembangkan usaha (Hartati et al., 2023). Oleh karena itu, sebuah komunitas dianggap berdaya jika mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, menjaga kestabilan ekonomi, menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, mempertahankan diri dari bahaya dari luar, serta berkembang dan berinovasi untuk mengaktualisasikan dirinya (Faidati, 2020). Pemberdayaan ekonomi adalah proses peningkatan kepemilikan faktor-faktor produksi, peningkatan kontrol terhadap pemasaran dan distribusi, pemberdayaan masyarakat untuk menuntut kompensasi yang adil, dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi, keahlian, dan keterampilan yang harus diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk di ranah kebijakan (Crismia, 2022).

C. METODE

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk melakukan investigasi. Menurut (Colorafi & Evans, 2016) bahwa penelitian yang mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, gambar, dan perilaku yang diamati disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ditetapkan oleh peneliti sebagai lokasi penelitian. Terdapat empat

dimensi/pendekatan pemberdayaan menurut (Suharto, 2014) antara lain: pemungkinan, penguatan, perlindungan, dan pendukung yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini dan sekaligus menjadi instrumen analisis studi ini.

Pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian (Sukmawati et al., 2023). Pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: kegiatan observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan narasumber yang berkompeten, serta studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif, dengan melalui langkah-langkah: mengumpulkan data, memilah data, dan menarik kesimpulan (Ridder, 2014).

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Usaha Bersama Komunitas di Desa Ngale merupakan program yang dibangun oleh Pemerintah Desa Ngale yang pertama kali dicanangkan pada tahun 2016 oleh Yan Teguh Wibowo, S.Sos seorang Kepala Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Tujuan dibangunnya program Usaha Bersama Komunitas oleh Pemerintah Desa Ngale ini tidak lain adalah untuk membentuk sumber daya manusia warga Desa Ngale khususnya keluarga kurang mampu dan belum memiliki pekerjaan. Selain itu, masyarakat desa juga dapat menggunakan Usaha Bersama Komunitas ini sebagai wadah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai modal untuk mencapai kesejahteraan hidup, serta untuk saling berinteraksi sosial yang lebih luas dalam rangka memupuk solidaritas sosial.

Dalam wawancara pendahuluan yang dilakukan, Yan Teguh Wibowo, S.Sos mengungkapkan bahwa pembangunan Usaha Bersama Komunitas di Desa Ngale ini juga di dasari oleh

rendahnya keadaan ekonomi sosial masyarakat desa yang diakibatkan oleh kegagalan panen di sektor pertanian yang berdampak pada kemampuan ekonomi dan sosial warga desa. Indikasi ekonomi dapat dilihat dari rendahnya daya beli, kemudian dari sisi sosial terlihat dari banyaknya warga Desa Ngale yang keluar desa untuk mencari pekerjaan demi bertahan hidup. Atas dasar kenyataan tersebut, Pemerintah Desa Ngale tergerak untuk menciptakan peluang lapangan kerja baru dan mendorong semangat untuk berwirausaha bagi masyarakatnya tanpa harus keluar daerah melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan dapat dipandang sebagai sebuah tujuan dan proses (Darwis, 2017). Sebagai sebuah proses, mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendukung kelompok masyarakat yang kurang mampu. Sebagai tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai oleh masyarakat agar lebih berdaya dan memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup (Darwis, 2017). Pemberdayaan adalah proses yang berkelanjutan selama masyarakat berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan perubahan (Sulaeman et al., 2023). Dalam kerangka penelitian ini, pemberdayaan menurut (Sulaeman et al., 2023) diatas diterapkan oleh Usaha Bersama Komunitas ini.

Keberhasilan pembangunan ekonomi lokal warga Desa Ngale melalui kegiatan pemberdayaan Usaha Bersama Komunitas ini diukur berdasarkan indikator menurut pemberdayaan (Suharto, 2014) antara lain pemungkinan, penguatan, perlindungan, dan pendukung.

1. Pemungkinan (*enabling*)

Pemungkinan (*enabling*) merupakan langkah awal dari proses pemberdayaan (Suharto, 2014). Yang

dimaksud dengan pemungkinan disini adalah terciptanya iklim lingkungan yang memungkinkan para anggota Usaha Bersama Komunitas untuk mengembangkan keahlian atau potensi secara optimal. Untuk mencapai hal tersebut, langkah pertama dalam proses pemberdayaan ini adalah melepaskan hambatan apa pun yang menghalangi masyarakat untuk mewujudkan potensi ekonominya secara penuh.

Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale memiliki suatu hambatan yang harus dicarikan solusi dan diselesaikan. Hambatan awal yang dialami adalah belum dimilikinya pengetahuan tentang produksi, belum adanya tempat sebagai lokasi produksi, serta minimnya modal karena masih terbatas dari iuran anggota. Terkait hambatan tersebut, Pemerintah Desa Ngale telah berupaya mendukung Usaha Bersama Komunitas dalam bentuk fasilitasi gedung sebagai tempat lokasi produksi. Pemerintah desa juga telah memberikan rangsangan dana untuk pelaksanaan kegiatan pertama kali Usaha Bersama Komunitas, yang digunakan untuk membeli sejumlah peralatan walau jumlahnya masih terbatas. Selain itu, terkait hambatan pengetahuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi juga telah memberikan motivasi kepada pengelola Usaha Bersama Komunitas yaitu berupa pemberian edukasi atau pembelajaran tentang pemahaman bagaimana cara mengelola unit usaha seperti Usaha Bersama Komunitas tersebut. Motivasi yang diberikan juga atas dasar kemauan pengelola dan anggota Usaha Bersama Komunitas sendiri, sehingga besar kemungkinan anggota kelompok akan menjalankan arahan yang diberikan selama proses edukasi atau pembelajaran.

Indikator pemungkinan pada

program Usaha Bersama Komunitas untuk mengatasi kemiskinan telah berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan pengelola dan anggota Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses pemberdayaan harus dilakukan dari bawah ke atas, dengan melihat kebutuhan, masalah, dan kemungkinan yang ada di masyarakat desa (Ompusunggu, 2018).

2. Penguatan (*empowering*)

Penguatan (*empowering*) ialah suatu proses dalam pemberdayaan untuk menumbuhkan peran dan kemampuan masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan lebih baik, terbuka akses terhadap segala sumber daya, mampu mengorganisir dan melakukan kontrol sosial (Suharto, 2014). Suharto mendefinisikan penguatan sebagai upaya perbaikan kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi termasuk masalah kemiskinan (Suharto, 2014). Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk menambah pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam proses pemberdayaan ialah melalui serangkaian kegiatan pendidikan non formal seperti pelatihan (Dacholfany, 2018).

Kegiatan utama Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale adalah memproduksi sabun cuci pakaian dan piring cair, serta dan pewangi pakaian. Berdasarkan penelitian yang telah lakukan, diketahui bahwa sebelum tahap pembuatan produk yang akan dapat diperdagangkan, anggota terlebih dahulu diberikan program pelatihan, pembekalan, dan juga pengenalan SOP untuk produksi. Pengelola Usaha Bersama Komunitas dengan Pemerintah Desa Ngale telah meminta bantuan dan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Ngawi untuk memberikan keterampilan atau pelatihan pembuatan produk sabun dan pelembut pakaian cair. Pada pelaksanaannya pelatihan tersebut juga telah melibatkan seluruh anggota Usaha Bersama Komunitas, sehingga hal ini dinilai menjadi salah satu faktor utama dimana semua anggota Usaha Bersama Komunitas sangat mahir dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Materi pelatihan yang diberikan diantaranya ialah cara memilih bahan baku yang berkualitas, cara mengolah bahan baku menjadi produk jadi, sampai dengan cara pengepakan produk, dan pengenalan SOP produksi.

Pelatihan yang diberikan juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana para anggota Usaha Bersama Komunitas memiliki keseriusan dan keuletan untuk menjalankan kegiatan usaha ini. Menurut Ife, pelatihan adalah jenis pendidikan yang paling khusus karena tujuan utamanya adalah untuk mendidik masyarakat komunitas sasaran dengan keterampilan yang akan bermanfaat bagi mereka dan masyarakat secara keseluruhan (Ridha, 2019). Pada intinya, pelatihan akan lebih berhasil jika keterampilan yang diberikan adalah keterampilan yang diharapkan dan diinginkan dipelajari oleh masyarakat itu sendiri, karena hal ini akan memungkinkan kelompok tersebut untuk meningkatkan taraf kehidupannya (Ibrahim et al., 2023).

Menurut peneliti penguatan (*empowering*) dalam Usaha Bersama Komunitas sudah berjalan dengan baik. Namun di sisi lain, dalam proses penguatan yang diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi masih terdapat kekurangan. Kekurangannya adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi hanya memberikan pengetahuan pelatihan terkait

proses produksinya saja, namun tidak memberikan ilmu pengetahuan tentang pemasaran produk. Kelemahan dalam pemberian penguatan (*empowering*) harus segera dilakukan perbaikan oleh pengelola Usaha Bersama Komunitas, Pemerintah Desa Ngale dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi agar tujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi lokal masyarakat dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

3. Perlindungan (*protecting*)

Perlindungan (*protecting*) yaitu memproteksi masyarakat ekonomi lemah supaya tidak tereksplotasi oleh kelompok ekonomi kuat, serta menghindarkan mereka dari persaingan tidak seimbang (Suharto, 2014). Kelompok ekonomi lemah disini yakni pelaku Usaha Bersama Komunitas yang belum berkembang dan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, maka menghilangkan segala bentuk dominasi yang tidak menguntungkan bagi kelompok ekonomi lokal harus menjadi tujuan dari perlindungan ini. Oleh karena itu, keberlangsungan usaha kelompok kecil harus terus dijaga selama proses implementasi pemberdayaan, dengan fokus pada pencegahan munculnya persaingan komersial yang tidak sehat dan tidak seimbang (Suharto, 2014).

Perlindungan pada kelompok usaha bersama seperti yang dijalankan oleh Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale ialah dalam bentuk legitimasi kelembagaan dan pemberian bantuan. Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale telah berdiri sejak tanggal 19 April 2016 dan saat ini telah memiliki Surat Keputusan dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tentunya hal ini menjadi sebuah keuntungan bagi Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale untuk dapat

berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam membantu keberlangsungan usahanya, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan maupun pemberian bantuan. Dengan adanya keabsahan secara hukum, tentu akan mempermudah bagi Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale dalam melakukan akses-akses yang dibutuhkan seperti: permodalan dan sebagainya. Minimnya modal juga akan mengakibatkan kelompok masyarakat tidak mampu mengembangkan usahanya (Gayo et al., 2020).

Seiring dengan perkembangan usaha yang tengah dilakukan, pengelola Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa Ngale mendapatkan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi senilai Rp. 60.000.000,00 dengan rincian dana: Rp. 20.000.000,00 diberikan dalam wujud peralatan pendukung produksi, Rp. 20.000.000,00 uang tunai yang digunakan untuk memperbaiki bangunan, dan bantuan modal untuk diolah sendiri oleh pengelola Usaha Bersama Komunitas sebesar Rp. 20.000.000,00. Segala jenis bantuan yang diberikan bagi Usaha Bersama Komunitas tentunya sangat dibutuhkan dalam proses pemberdayaan. Berkat bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk kelompok usaha bersama, dapat dimanfaatkan untuk menambah modal fasilitas yang cukup untuk berkegiatan usaha, sehingga mereka dapat terlindung dari persaingan yang tidak sehat atau eksploitasi oleh organisasi yang lebih kuat.

Bantuan modal tentu akan mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran kelompok usaha bersama selama menjalankan usaha (Paulu et al., 2022). Ketika pengeluaran modal lebih banyak dari pendapatan atau keuntungan

yang diperoleh, tentu hal ini akan dapat membahayakan kelangsungan hidup kelompok pada jangka panjang (Silanno & Loupatty, 2021). Untuk itu agar kelompok usaha semakin berdaya, diperlukan bantuan-bantuan dari pemerintah baik bantuan modal atau sarana lainnya. Namun lebih bermanfaat lagi jika bantuan yang diberikan bukanlah untuk modal awal, tetapi ketika usaha tersebut berjalan dan menunjukkan prospek yang baik (Solekha et al., 2021).

Meskipun perlindungan bagi Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale dilakukan dalam bentuk legitimasi kelembagaan dan bantuan permodalan telah di dapatkan, namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan yang dijalankan kurang berjalan secara optimal dikarenakan perlindungan secara individu anggota seperti perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan belum terpenuhi.

4. Pendukung (*supporting*)

Pendukung (*supporting*) menggambarkan tindakan yang berguna dalam mempromosikan perubahan sosial yang konstruktif pada masyarakat kelompok usaha (Suharto, 2014). Sehingga pemberdayaan harus mampu mendukung masyarakat agar tidak semakin lemah dari posisi sebelumnya (Tjiptaningsih, 2017). Dengan kata lain, sejauh mana cara pemerintah memberikan dukungan dan bantuan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat untuk memberdayakannya.

Wujud *supporting* dalam pemberdayaan Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale dilakukan berupa jalinan komunikasi langsung secara intensif selama pendampingan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Ngale dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi agar proses pemberdayaan yang tengah dilakukan terus dapat berjalan dan

sesuai tujuan. Jalinan komunikasi yang dilakukan sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah kepada masyarakat serta sebagai wujud tanggungjawab (Muchtar, 2016). Selain itu, bentuk dukungan yang diberikan ialah ikut berpartisipasi Pemerintah Desa Ngale dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi dalam mengintensifkan sosialisasi jenis produk yang dihasilkan Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale kepada masyarakat luas agar laku atau dapat diserap oleh pasar.

Dukungan (*supporting*) dalam pemberdayaan program Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale sudah cukup

berjalan secara optimal. Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Ngale dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi bukan hanya sekedar isapan jempol saja, melainkan tindakan langsung dan nyata yang telah dilakukan. Sehingga saat ini, Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale sudah mampu menjual produk dan telah siap bersaing dengan produk-produk *branded* di pasaran.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, kemudian peneliti dapat menyederhanakan hasil penelitian dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Peneltian

No	Pendekatan Pemberdayaan	Hasil penelitian	Keterangan
1	Pemungkinan (<i>enabling</i>)	Berjalan secara efektif	Dilakukan secara <i>bottom up</i> sesuai potensi, masalah, dan kebutuhan Usaha Bersama Komunitas.
2	Penguatan (<i>empowering</i>)	Berjalan cukup baik	Pelatihan yang diberikan masih sebatas pada proses produksi. Ilmu pengetahuan tentang pemasaran produk belum diberikan/dilakukan.
3	Perlindungan (<i>protecting</i>)	Berjalan kurang optimal	Perlindungan hanya dalam bentuk legitimasi kelembagaan dan bantuan permodalan. Perlindungan secara individu seperti perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan belum dapat terpenuhi.
4	Pendukung (<i>supporting</i>)	Berjalan secara optimal	Pemerintah secara intensif berpartisipasi dalam membantu sosialisasi produk kepada masyarakat luas.

Pemerintah desa dan masyarakat Desa Ngale bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun potensi yang ada agar masyarakat dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari oleh keinginan dan kemampuan masyarakat

untuk merubah dan memajukan perekonomian keluarga melalui kegiatan usaha bersama. Setelah menjadi anggota Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale dengan memproduksi barang bernilai ekonomi seperti sabun cuci pakaian, sabun cuci piring, dan pewangi pakaian,

masyarakat sudah merasakan manfaatnya yaitu adanya perubahan dalam kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Indikator keberhasilan dalam peningkatan ekonomi ini ialah cukup membantu mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolah.

Maka, Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale yang telah berjalan selama 8 tahun ini telah berhasil membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa. Kemandirian ekonomi adalah kemampuan orang untuk dapat mengelola, memenuhi, dan tidak tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya (Misjaya et al., 2019).

Jika dilihat dari indikator kebutuhan hidup, maka dengan adanya perkembangan usaha yang dijalankan oleh Usaha Bersama Komunitas maka secara otomatis juga berdampak pada pendapatan anggota keluarga karena lebih banyak keuntungan berarti lebih tinggi pendapatan keluarga. Jika dilihat dari sisi indikator perubahan hidup rumah tangga, dimana perubahan yang dirasakan adalah yang dulunya hidup pas-pasan atau malah kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, saat ini mereka merasa lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian, perubahan hidup rumah tangga yang dirasakan tentunya juga telah mempengaruhi perubahan psikologis anggota diaman saat ini mereka lebih percaya diri dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat, seperti aktif ikut kerja bakti, arisan, dan kondangan.

Pada tingkat masyarakat, Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale merupakan suatu wadah bagi mereka yang belum berdaya dan dilakukan secara kolektif untuk menumbuhkan sikap saling gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab, serta tindakan kolektif untuk melakukan usaha ekonomi guna

menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan bersama.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Penelitian mengenai pembangunan kemandirian ekonomi lokal masyarakat desa melalui pemberdayaan Usaha Bersama Komunitas di Desa Ngale Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Bersama Komunitas di Desa Ngale sudah berjalan, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum berjalan secara optimal. Pada dimensi *enabling*, sudah berjalan secara efektif karena dilakukan secara *bottom up* sesuai potensi, masalah, dan kebutuhan Usaha Bersama Komunitas. *Empowering* cukup juga sudah berjalan dengan baik, namun masih sebatas produksinya saja dimana ilmu tentang pemasaran belum tidak diajarkan. *Protecting* berjalan kurang optimal karena hanya dalam bentuk legitimasi kelembagaan dan bantuan permodalan, sedangkan perlindungan secara individu anggota belum dapat terpenuhi. Hanya *supporting* saja yang sudah berjalan secara optimal karena ada dukungan dan partisipasi pemerintah, dimana pemerintah secara intensif membantu mensosialisasikan produk Usaha Bersama Komunitas kepada masyarakat luas. Walaupun pemberdayaan belum berjalan secara optimal, namun kegiatan Usaha Bersama Komunitas Desa Ngale telah berhasil membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa jika melihat dari indikator terpenuhinya kebutuhan hidup, perubahan hidup rumah tangga, dan perubahan psikologis anggota keluarga.

Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini

dapat diimplementasikan oleh pemerintah khususnya di desa agar lebih mengoptimalkan lagi dalam mempraktikkan proyek pembangunan ekonomi di desa agar lebih dapat mendukung terciptanya kemandirian ekonomi lokal melalui proses pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga berimplikasi pada kajian keilmuan di bidang pemberdayaan, yang diharapkan nantinya dapat memberikan solusi kepada pihak-pihak yang berkaitan guna memecahkan permasalahan yang terjadi saat melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan agar tujuan pembangunan kemandirian ekonomi lokal desa melalui pemberdayaan Usaha Bersama Komunitas dapat tercapai dan terus berjalan secara lebih optimal. *Pertama*, pelaksanaan pemberdayaan Usaha Bersama Komunitas di Desa Ngale diharapkan terus dilakukan secara *bottom up* agar sesuai kebutuhan masyarakat sendiri. *Kedua*, pengelola dan anggota Usaha Bersama Komunitas harus diberikan pelatihan mengenai manajemen pemasaran agar produk-produk yang dihasilkan dapat laku pasaran. *Ketiga*, perlindungan secara individu bagi setiap anggota Usaha Bersama Komunitas seperti perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan harus terpenuhi, seperti diikutkan dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. *Keempat*, Pemerintah Desa Ngale bersama Dinas terkait yang selama ini memberikan bantuan sebaiknya terus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi lebih rutin agar dapat mengetahui potensi dan kendala serta sekaligus memberikan solusi.

REFERENSI

- Adawiyah, S. El. (2020). Kemiskinan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43–50.
- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11(2), 66–82. <https://doi.org/10.35724/jies.v11i2.2965>
- Azizah, S. N., & Muhfiatun, M. (2018). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(2), 63. <https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i2.1273>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. BPS - Statistics Indonesia.
- Colorafi, K. J., & Evans, B. (2016). Qualitative Descriptive Methods in Health Science Research. *HERD: Health Environments Research & Design Journal*, 9(4), 16–25. <https://doi.org/10.1177/1937586715614171>
- Crismia, R. (2022). *Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Wanita Tani Mekar Sari Sejahtera Kelurahan Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar)*. Doktoral UIN Raden Intan Lampung.
- Dacholfany, M. I. (2018). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan non-formal. *Tapis:*

- Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(1), 43–74.
- Darwis, R. S. (2017). Membangun Desain Dan Model Action Research Dalam Studi Dan Aksi Pemberdayaan Masyarakat. *Komunika: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(1), 142–153.
<https://doi.org/10.24090/komunika.v10i1.869>
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2019*. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT.
- Faidati, N. (2020). Pemberdayaan Komunitas UMKM ‘Usaha Mandiri Sakinah’ Nogotirto, Gamping, Sleman, DIY Menuju UMKM yang Berdaya Saing. *Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 88–93.
- Ferizaldi, F. (2022). Urgensi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(2), 158–169.
<https://doi.org/10.24815/jsu.v16i2.28904>
- Gai, A. M., Witjaksono, A., & Maulida, R. R. (2020). *Perencanaan dan Pengembangan Desa* (1st ed.). CV. Dream Litera Buana.
- Gayo, S. B., Erlina, & Rujiman. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Media Komunikasi Geografi*, 21(2), 202–209.
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191–206.
<https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632>
- Haris, A. (2014). Memahami Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat. *Jupiter: Jurnal Ilmiah Universitas Hasanuddin*, 13(2), 50–62.
- Hartati, P., Amirulloh, M., & Munandar, E. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kompromi Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 630–640.
- Hidayat, D. (2020). Teknik Identifikasi Kebutuhan Belajar Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelatihan Kewirausahaan. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(2), 156.
<https://doi.org/10.22460/comm-edu.v3i2.4193>
- Hilman, Y. A., & Nimasari, E. P. (2018). Model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas. *ARISTO*, 6(1), 45.
<https://doi.org/10.24269/ars.v6i1.778>
- Ibrahim, A., Rifa'i, B., & Dewi, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM untuk Meningkatkan Keterampilan Masyarakat Miskin. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(4).
<https://doi.org/10.15575/tamkin.v5i4.23925>
- Maspaitella, M. J. , & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial.

- Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 157–164.
- Ma'wa, R., & Cahyadi, I. F. (2023). Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2021 dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Kudus). *Jebisku: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 1(1), 97–113.
- Misjaya, M., Bukhori, D. S., Husaini, A., & Syafri, U. A. (2019). Konsep Pendidikan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo - Jawa Timur. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(01), 91. <https://doi.org/10.30868/ei.v8i01.371>
- Muchtar, K. (2016). Penerapan Komunikasi Partisipatif Pada Pembangunan Di Indonesia. *Makna : Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa Dan Budaya*, 1(1), 20–32.
- Ompusunggu, V. M. (2018). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo. *Jupeko (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 3(2), 18–26.
- Paulu, N., Amaliah, T. H., & Lukum, A. (2022). Pengaruh Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 5(1), 175–182.
- Raharjo, M. M. I. (2022). *Manajemen Pelayanan Publik* (Tarmizi, Ed.). Bumi Aksara.
- Rianda, C. N. (2020). Analisis Dampak Pengangguran Berpengaruh Terhadap Individual. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 17. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.358>
- Ridder, H.-G. (2014). Book Review: Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. *German Journal of Human Resource Management: Zeitschrift Für Personalforschung*, 28(4), 485–487. <https://doi.org/10.1177/239700221402800402>
- RIDHA, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5549>
- Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. *Publika*, 10(3), 881–894.
- Silanno, G. L., & Loupatty, L. G. (2021). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio Dan Return On Asset Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan-Perusahaan Di Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(7), 85–109.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

- Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58.
<https://doi.org/10.28918/velocity.v1i1.3647>
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (5th ed.). Refika Aditama.
- Sukmawati, Salmia, & Sudarmin. (2023). Population, Sample (Quantitative) and Selection of Participants/Key Informants (Qualitative). *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 7(1), 131–140.
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 87–96.
<https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i2.34>
- Suman, A., Putra, R. E. N., Amalia, S., Hardanto, H., Kusuma, C. A., & Amir, F. (2019). *Ekonomi lokal: pemberdayaan dan kolaborasi*. Universitas Brawijaya Press.
- Tjiptaningsih, W. (2017). Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha Perempuan Di Desa Sindangkempeng Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon). *Reformasi : Jurnal Ilmiah Administrasi*, 2(1), 28–35.